

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Citra Buana, Bandung, 2001
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Adiwinata, Saleh, *Pengertian Hukum Adat Menurut Undang-Undang Pokok Agraria*, Cetakan Ke-2, Alumni, Bandung, 1990
- Ali Sofyan Husein , *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1997
- Chairani Bustami, *Aspek-Aspek Hukum Yang Terkait Dalam Akta Perikatan Jual Beli Yang Dibuak Notaris Dalam Kota Medan*, USU, Medan, 2003
- Djaja Meliala, *Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Tarsito, Bandung, 1992
- Effendi Perangin-Angin, *Praktek Jual Beli Tanah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994
- G.H.S. Lumbang Tobing, , *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga Ciracas, Jakarta, 1993

- Gunawan Widjaja, , *Kartini Muljadi, Seri Hukum Perikatan Jual Beli*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003
- Habib Adjie, *Pengakan Etika Profesi Notaris dari Perspektif Pendekatan Sistem Media Notariat*, INI, Jakarta, 2002
- _____, *Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah Dari Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1996
- Jimly Asshiddigie, *Independensi dan Akuntabilitas Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Renvoi, Jakarta, 2003
- Komar Andasasmita, *Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat*, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung, 1991
- Muctar Wahid, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Reulika, Jakarta:,2008
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Central for Documentation Studies of Business Law (CDSBL), Yogyakarta, 2003
- Ridawan Khairandy, , *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, FH UI Pasca Sarjana, Jakarta, 2003
- SalehvK. Wantjik, 1997, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soedjendro, J. Kartini, *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik, Tafsir Sosial Hukum PPAT-Notaris Ketika Menangani Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik*, Kanisius, Yogyakarta, 2001
- Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Edisi I, Rajawali, Jakarta, 1992
- Soimin Soedharyo, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Subekti, R. Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet-XIV, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ke-25, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1992
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1990

Sutrisno, *Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Tanpa Penerbit, Medan, 2007

Widjaya, I.G. Rai, *Merancang Suatu Kontrak*, Megapoin, Jakarta, 2003

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

C. Sumber lain

<http://gamas09.blogspot.com/2009/03/larangan-kuasa-mutlak.html>, diakses tanggal 17 Oktober 2012.

Ali Boediarto, *Putusan Badan Peradilan*, Majalah Varia Peradilan, Edisi Oktober 1990.

Nelly Sriwahyuni Siregar : *Tinjauan Yuridis Kedudukan Kuasa Mutlak Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Oleh Notaris / PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)*, USU, Medan, 2008

Wawancara dengan Yuliandi, kepala Badan Pertanahan Kota Langsa tanggal 4 Juli 2018 (diolah)

Wawancara dengan Riza Octarina, Notaris/PPAT Kota Langsa tanggal 12 Juli 2018 (diolah)

Wawancara dengan Zuhdi Majid, Notaris/PPAT Kota Langsa tanggal 12 Juli 2018 (diolah)

Wawancara dengan Rahmawati Lubis, pemberi Kuasa Mutlak pada tanggal 18 Juli 2018 (diolah)

Wawancara dengan Januar Effendi, penerima Kuasa Mutlak pada tanggal 18 Juli 2018 (diolah)

Wawancara dengan Ruslaini, pemberi Kuasa Mutlak pada tanggal 18 Juli 2018 (diolah)

Wawancara dengan Abdul Hakim, penerima Kuasa Mutlak pada tanggal 18 Juli 2018 (diolah)

Wawancara dengan M. Iqbal Asnawai, Akademisi Hukum Perdata Universitas Samudra tanggal 21 Juli 2018 (diolah)